

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RPJMD 2010–2015)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010–2015 merupakan penjabaran dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 untuk tahap 5 (lima) tahun kedua. Oleh karena itu Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010–2015 harus selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025.

1. Visi

“ Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia”

2. Misi

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik;
- b. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum;
- c. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme;
- d. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan;
- e. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;
- f. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

RPJP Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 mengamanatkan bahwa Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga tahap II Tahun 2010–2015 ditekankan pada upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang semakin berkualitas, memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang ditunjang penyediaan berbagai prasarana sosial ekonomi yang

semakin meningkat kapasitas dan kualitasnya, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan kemudian diderivasikan menjadi tujuan Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien; transparan; akuntabel; memiliki strategi yang jelas; mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
2. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang dengan meningkatkan kesadaran sosial masyarakat serta pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM); mewujudkan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi; serta mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia sehingga akan meningkatkan akselerasi pembangunan;
3. Mewujudkan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatkan partisipasi politik rakyat, serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kualitas intelektual; terwujudnya kesetaraan gender; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; berkembangnya semangat gotong royong; serta semangat dan wawasan kebangsaan sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan social;

5. Memantapkan jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga yang tercermin pada berkembang dan meningkatnya apresiasi terhadap budaya yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa;
6. Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga;
7. Meningkatkan pendapatan per kapita riil masyarakat secara lebih merata dengan mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; meningkatkan peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi dengan didukung investasi swasta yang ramah tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan;
8. Menyediakan infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi secara merata di seluruh wilayah, sehingga mampu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, meliputi jalan dan jembatan, prasarana perhubungan, irigasi, permukiman, kelistrikan, dan telematika sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata;
9. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; memulihkan kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat; memelihara kekayaan keragaman sumberdaya hayati dan kekhasan sumber daya alam, melalui perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berorientasi hasil

dan berbasis kinerja. Dalam tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun dokumen perjanjian kinerja sebagai komitmen dan janji untuk mencapai target kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan targetnya secara realistis untuk setiap indikator kinerja. Target-target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, didasarkan pada kondisi dan ketersediaan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan potensi daerah.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
1	Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.	o Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.	8 kasus (100% tertangani)
		o Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Baik (76)
		o Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor	340 temuan
2	Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien, serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.	o Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	14 SPM
		o Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik.	6 SKPD
		o Terwujudnya website e-procurement	100%

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
3	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.	o Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu	
		▪ Revisi RTRW	Ada
		▪ RPJM	Ada
		▪ Dokumen Perencanaan Tahunan	Ada dan tepat waktu
		o Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.	100%
		o Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan manfaat.	1.830 kegiatan
		o Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian	WTP
4	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang	o Menurunnya Angka kriminalitas	3 kasus (0,003%)
		o Menurunnya angka pelanggaran perda	1.000 kasus
		o Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat	5 kasus

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
5	Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM).	o Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat	166 kelompok
		o Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat	10 kasus
		o Menurunnya kasus <i>trafficking</i>	Tidak ada
6	Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, serta meningkatkan akselerasi pembangunan.	o Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/ tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi	Tidak ada
		o Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat	Tidak ada
7	Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta	o Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati	Pilkada 75%

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
	meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	o Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD	4 Raperda
		o Penetapan APBD tepat waktu	Tepat waktu
8	Meningkatnya kualitas manusia secara umum	o Indeks Pembangunan Manusia	74,20
		o Indeks Pembangunan Gender	66,88
9	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga.	o Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera	71.000 KK
		o Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	0,35%
		o Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	87.224 KK
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,	o Meningkatnya usia harapan hidup	71,08 tahun
		o Menurunnya angka kematian bayi	9 kasus /1.000 KH
		o Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	90 kasus /100.000 KH
		o Menurunnya presentase	2,16%

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
		gizi kurang	
		o Menurunnya presentase gizi buruk	0,05%
		o Meningkatnya pemberian asi eksklusif	78%
		o Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100%
11	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	o Meningkatnya Angka melek huruf	94%
		o Meningkatnya rata-rata lama sekolah	7,27 tahun
		o Meningkatnya angka partisipasi sekolah	
		- APM SD/MI/PAKET A	95%
		- APM SMP/MTs/PAKET B	76%
		- APM SMA/SMK/MA/PAKET C	43%
12	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	o Meningkatnya indeks pembangunan gender	66,88
		o Meningkatnya indeks pemberdayaan gender	64,2
		o Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur	0
		o Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	4 kasus

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
		o Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	4 kasus
13	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga	o Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	10%
		o Menurunnya jumlah rumah tangga miskin	19%
14	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya kualitas intelektual; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; serta berkembangnya semangat gotong royong sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika	o Menurunnya angka kasus kenakalan remaja	11 kasus
		o Menurunnya kasus penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain (NAPZA)	20 kasus
		o Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif	141 organisasi
		o Meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan	40.000 orang
		o Menurunnya konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat	2 kasus

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
	dalam kehidupan sosial.		
15	Semakin kokohnya jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga	o Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional	275 kelompok
		o Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional	23 kali
		o Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	10 kegiatan
		o Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama	Etnis 4 kali Agama 8 kali
16	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan yang mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.	o Stabilitasnya angka inflasi	5-6%
		o Meningkatnya daya beli masyarakat (PPP)	Rp. 690.000,-
		o Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar	160 sampel
		o Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun)	125.213 kg/kapita/th
		o Meningkatnya indeks konsumsi non pangan	45%
17	Semakin meningkat dan meratanya pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan	o Meningkatnya pendapatan per kapita	Rp. 9 Juta/ th
		o Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini)	0,248

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
	kemiskinan.	o Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (indek Williamson)	0,482
		o Menurunnya angka pengangguran	4.500 orang
		o Menurunnya angka kemiskinan	19%
18	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi.	o Meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani.	110
		o Meningkatnya investasi di sektor agribisnis	8%
		o Menurunnya penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian	20%
		o Meningkatnya angka kunjungan wisata	1.600.000 orang
		o Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB sektor hotel dan restoran)	17%
		o Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB	1,5%
		o Meningkatnya jumlah	43.000 industri

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
		industri kecil	
19	Meningkatnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing, yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan	- o Meningkatnya jumlah PMA - o Meningkatnya nilai investasi PMA - o Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten - o Menurunnya angka pengangguran	22 perusahaan Rp. 10.000.000.000,- Rp. 1.101.600,- 4.500 orang
20	Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi	- o Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal - o Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik - o Panjang jembatan - o Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis - o Jumlah prasarana pelayanan kesehatan - o Jumlah prasarana pelayanan pendidikan	710.204 km (100%) 521.558 km (73,44%) 2.884,8 m 11.457,245 ha 3.746,251 ha PKD 204, Pustu 49, Puskesmas 22 unit Ruang kelas SD/MI 5.280, SMP/MTs 1.463, SMA/SMK/MA

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
			841 ruang kelas
		o Jumlah pasar tradisional	19
21	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	o Menurunnya luasan kawasan kumuh	Tidak ada
		o Menurunnya persentase rumah tidak layak huni	5%
		o Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	83,70%
		o Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air bersih	100%
		o Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan	40.200 SR
		o Meningkatnya cakupan layanan persampahan	$\frac{210 \text{ m}^3/\text{hr}}{320 \text{ m}^3/\text{hr}}$
		o Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,20 m ³ /penduduk
22	Terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi	o Meningkatnya rasio elektrifikasi	85%
		o Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar	Menurun
23	Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk	o Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi	1 desa

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
	mewujudkan masyarakat informasi.	o Jumlah warung internet	60 warnet
		o Jumlah hot spot area di ruang publik	55 lokasi
		o Jumlah jenis pelayanan publik secara online	29 (1 Website Purbalingga, 26 sub domain, 1 sistem surat elektronik, LPSE)
		o Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika	100%
24	Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat	o Menurunnya luas lahan kritis	
		▪ Persentase lahan kritis di kawasan lindung	3%
		▪ Presentase Lahan kritis di kawasan budidaya pertanian	5%
		o Menurunnya tingkat pencemaran udara, air dan tanah	100%
25	Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.	o Terjaganya keragaman hayati (<i>biodiversity index</i>)	100%
		o Jumlah kasus dan persentase penegakan pelanggaran perusakan lingkungan hidup	100%

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2015
1	2	3	4
26	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.	o Jumlah dan persentase perusahaan wajib AMDAL yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL)	100%
		o Meningkatnya kelompok peduli lingkungan	17 kelompok
		o Menurunnya penggalian tambang tanpa ijin	Wewenang provinsi
		o Menurunnya kasus pencurian kayu	100%